



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI
JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V
JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10 JAKARTA PUSAT TELEPON (021) 34835146 FAKSIMILE (021) 34835155 LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta5

NOTA DINAS
NOMOR ND-394/KNL.0705/2024

Yth. : 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta II
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan Audited TA 2023
Tanggal : 13 Mei 2024

Sehubungan dengan nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pebendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta II nomor ND-708/KPN.1202/2024 tanggal 5 April 2024 hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Tahun 2023 Audited, dengan ini kami sampaikan Laporan Keuangan Audited TA 2023 KPKNL Jakarta V sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Partolo





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN TA 2023 *(AUDITED)*

KPKNL JAKARTA V

JALAN KKO USMAN DAN HARUN
NO. 10, SENEN, JAKARTA PUSAT,
DKI JAKARTA

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

KPKNL Jakarta V adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kanwil DJKN DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Jakarta V mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPKNL Jakarta V. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 13 Mei 2024
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Partolo



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	39
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	45
F. Pengungkapan Penting Lainnya	49
VI. Lampiran	50



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA V**

JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, JAKARTA 10710
TELEPON; (021) 34835146; FAKSIMILE: (021) 34835155

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 13 Mei 2024

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Partolo

Laporan Keuangan KPKNL Jakarta V Tahun Anggaran 2023 *Unaudited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 75.592.880.761,00 atau mencapai 161% dari estimasi pendapatan sebesar Rp 46.887.345.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 3.108.806.613,00 atau mencapai 92% dari alokasi anggaran sebesar Rp 3.376.924.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 54.449.166.860,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 54.110.464.5066,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp 338.702.794,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 53.618.111.881,00 dan Rp 831.054.979,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 75.223.188.428,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 3.195.170.029,00 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp 72.028.018.399,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 25.355.244,00 dan Rp 0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp 72.053.373.623,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp 1.190.447.004,00 ditambah Surplus-LO sebesar Rp 72.053.373.623,00 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0,00 dan dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar Rp (72.412.765.648,00) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 831.054.979,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KPKNL JAKARTA V LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	46.887.345.000	75.592.880.761	28.705.535.761	161	41.711.502.000	45.249.249.125	3.537.747.125	108
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	46.887.345.000	75.592.880.761	28.705.535.761	161	41.711.502.000	45.249.249.125	3.537.747.125	108
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BARANG	3.271.703.000	3.007.838.613	(263.864.387)	92	2.355.947.000	2.160.991.719	(194.955.281)	92
	BELANJA MODAL	105.221.000	100.968.000	(4.253.000)	96	0	0	0	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBANUTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANADESA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	3.376.924.000	3.108.806.613	(268.117.387)	92	2.355.947.000	2.160.991.719	(194.955.281)	92
C	PEMBIAYAAN				0				0

KPKNL JAKARTA V
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	0	4,834	(4,834)	(100.00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	53,617,782,037	37,173,017,420	16,444,764,617	44.24
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	50,332,500	416,640,000	(366,307,500)	(87.92)
Persediaan	442,349,529	425,303,111	17,046,418	4.01
JUMLAH ASET LANCAR	54,110,464,066	38,014,965,365	16,095,498,701	42.34
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	4,154,632,641	4,008,402,189	146,230,652	3.65
Aset Tetap Lainnya	22,852,900	22,852,900	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,636,782,947)	(3,682,472,814)	(156,310,133)	4.24
JUMLAH ASET TETAP	338,702,794	348,782,275	(10,079,481)	(2.89)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	35,037,348	29,118,126	5,919,222	20.33
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(35,037,348)	(29,118,126)	(5,919,222)	20.33
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	54,449,166,860	38,363,747,640	16,085,419,220	41.93
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	53,618,111,881	37,173,300,636	16,444,811,245	44.24
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	53,618,111,881	37,173,300,636	16,444,811,245	44.24
JUMLAH KEWAJIBAN	53,618,111,881	37,173,300,636	16,444,811,245	44.24
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	831,054,979	1,190,447,004	(359,392,025)	(30.19)
JUMLAH EKUITAS	831,054,979	1,190,447,004	(359,392,025)	(30.19)
JUMLAH EKUITAS	831,054,979	1,190,447,004	(359,392,025)	(30.19)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	54,449,166,860	38,363,747,640	16,085,419,220	41.93

KPKNL JAKARTA V
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	75.223.188.428	42.739.871.737	32.483.316.691	76.002
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	75.223.188.428	42.739.871.737	32.483.316.691	76.002
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	75.223.188.428	42.739.871.737	32.483.316.691	76.002
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	146.670.627	230.985.708	(84.315.081)	(36.502)
Beban Barang dan Jasa	1.923.283.488	1.482.203.721	441.079.767	29.758
Beban Pemeliharaan	235.667.696	241.099.999	(5.432.303)	(2.253)
Beban Perjalanan Dinas	707.993.237	282.233.923	425.759.314	150.853
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

KPKNL JAKARTA V
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	181.554.981	169.964.970	11.590.011	6.819
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3.195.170.029	2.406.488.321	788.681.708	32.773
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	72.028.018.399	40.333.383.416	31.694.634.983	78.582
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	3.379.999	0	3.379.999	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	3.379.999	0	3.379.999	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	21.975.225	0	21.975.225	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	21.975.225	0	21.975.225	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	25.355.224	0	25.355.224	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	72.053.373.623	40.333.383.416	31.719.990.207	78.645
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	72.053.373.623	40.333.383.416	31.719.990.207	78.645

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KPKNL JAKARTA V
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,190,447,004	3,808,062,869	(2,617,615,865)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	72,053,373,623	40,333,383,416	31,719,990,207	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(72,412,765,648)	(42,950,999,281)	(29,461,766,367)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(359,392,025)	(2,617,615,865)	2,258,223,840	-
EKUITAS AKHIR	831,054,979	1,190,447,004	(359,392,025)	-

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis KPKNL Jakarta V

Dasar Hukum KPKNL Jakarta V didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006. Berkedudukan di Jalan Prajurit Usman dan Harun Nomor 10, Jakarta. KPKNL Jakarta V mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran KPKNL Jakarta V diharapkan kualitas laporan Kementerian Negara/Lembaga dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V berkomitmen dengan visi “menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang terpercaya, akuntabel, dan terbaik di tingkat regional untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan” untuk mewujudkan visi terssebut Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V melakukan beberapa langkah – langkah strategis sebagai berikut;

- Mewujudkan pelayanan yang baik secara efektif dan efisien kepada satuan kerja yang berada dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.
- Memberikan citra positif sebagai perwakilan kementerian Keuangan di daerah kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat di wilayah Jakarta.
- Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang,

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, tugas-tugas seperti penyelesaian mengenai usul penghapusan, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, atau hal-hal lain terkait dengan pengelolaan barang milik negara, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan kekayaan negara lainnya, piutang, dan lelang dari Kementerian Negara/Lembaga selanjutnya ditangani oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Dengan demikian, hingga saat ini Kanwil DJKN DKI Jakarta membawahi 5 (lima) kantor vertikal, yaitu KPKNL Jakarta I, KPKNL Jakarta II, KPKNL Jakarta III, KPKNL Jakarta IV, dan KPKNL Jakarta V.

Pada tahun 2023 KPKNL Jakarta V berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 1113,14%.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPKNL Jakarta V. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

KPKNL Jakarta V menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPKNL Jakarta V dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar,

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari KPKNL Jakarta V. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Jakarta V adalah sebagai berikut:

*Pendapatan–
LRA*

(1) Pendapatan–LRA

- Pendapatan–LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan–LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan–LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan–LO

(2) Pendapatan–LO

- Pendapatan–LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan–LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan Pendapatan–LO pada KPKNL Jakarta V adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas I diakui setelah disetor ke Kas Umum Negara;
- Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung Hutang;

- Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji diakui setelah terbit SP2D untuk pembayaran belanja pegawai berupa gaji PNS;
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan

organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya

apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar,

Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali

Akuntansi

Pemerintah

Berbasis AkruaI

Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja KPKNL Jakarta V memperoleh alokasi anggaran TA 2023 sebesar Rp 2.727.172.000,00. Selama tahun 2023, dilakukan revisi DIPA terkait adanya realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA TA 2023

Uraian	TA 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Akhir
Pendapatan		
Pendapatan PNB	46.887.345.000	46.887.345.000
Jumlah Pendapatan	46.887.345.000	46.887.345.000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	2.621.951.000	3.271.703.000
Belanja Modal	105.221.000	105.221.000
Jumlah Belanja	2.727.172.000	3.376.924.000

Realisasi

Pendapatan

Rp

75.592.880.761,00

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 75.592.880.761,00. Pendapatan KPKNL Jakarta V terdiri Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I, Pendapatan Bea Lelang Pegadaian, Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil, serta Pendapatan Anggaran lain-lain yang bersumber dari dana mengendap pada rekening bendahara penerimaan yang disetorkan ke kas negara. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2023

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			%REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALI AN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETO	
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	16.000.000	3.379.999	0	3.379.999	21,12%
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	9.000.000	0			
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	25.000.000	3.379.999	0	3.379.999	13,52%
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	582.522	0	582.522	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	582.522	0	582.522	0
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan	0				
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	487.543	0	487.543	
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	33.755.000.000	27.300.431.862	0	27.300.431.862	80,88%
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2.240.000.000	3.149.898.004	0	3.149.898.004	140,62%
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	10.867.345.000	45.129.076.214	0	45.129.076.214	415,27%
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 4257	46.862.345.000	75.579.893.623	0	75.579.893.623	161,28%
4259	Pendapatan Lain-lain	0				
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	9.024.617	0	9.024.617	0
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil	0	0	0	0	
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	9.024.617	0	9.024.617	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	46.887.345.000	75.592.880.761	0	75.592.880.761	161,22%
	JUMLAH PENDAPATAN	46.887.345.000	75.592.880.761	0	75.592.880.761	161,22%

Realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami kenaikan 67% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan oleh kenaikan yang signifikan pada pendapatan biaya administrasi pengurusan piutang Negara.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	3.379.999	-	0,00
Pendapatan Bea Lelang Kelas I	27.300.431.862	27.862.200.309	(2,02)
Pendapatan Biaya Adm Pengurusan Piutang Negara	45.129.076.214	14.474.392.048	211,79
Pendapatan Jasa Lainnya	582.522	-	0,00
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	3.149.898.004	2.873.700.420	9,61
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	487.543	71.269	584,09
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil	-	2	(100,00)
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	9.024.617	38.885.077	(76,79)
Jumlah	75.592.880.761	45.249.249.125	67,06

Realisasi Belanja Negara
Rp
3.108.806.613,00

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2023 adalah sebesar Rp 3.108.806.613,00 atau 92% dari anggaran belanja sebesar Rp 3.376.924.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

NO	URAIAN	TA 2023			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6
	BELANJA				
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0
	BELANJA BARANG	3.271.703.000	3.007.838.613	(263.864.387)	92
	BELANJA MODAL	105.221.000	100.968.000	(4.253.000)	96
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA	3.376.924.000	3.108.806.613	(268.117.387)	92

Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 44 % dibandingkan dengan TA 2022. Hal ini disebabkan adanya peningkatan belanja non operasional berupa kenaikan honorarium wakil kerja penjaga aset eks BPPN dan belanja perjalanan dinas dalam negeri guna pelaksanaan tugas dan fungsi.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	0,00
Belanja Barang	3.007.838.613	2.160.991.719	39,19
Belanja Bantuan Sosial	100.968.000	-	0,00
Belanja Modal	-	-	100,00
Jumlah	3.108.806.613	2.160.991.719	43,86

Belanja Pegawai

Rp 0

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Hal ini disebabkan oleh sentralisasi belanja pegawai pada Kantor Pusat DJKN. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	0.00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	0.00
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	0.00
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	0.00
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	0.00
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	0.00
Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	0.00
Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	0.00
Belanja Uang Makan PNS	-	-	0.00
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	-	-	0.00
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	0.00
Belanja Lembur	-	-	0.00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0.00
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	0.00
Jumlah Belanja	-	-	0.00

Belanja Barang

Rp

3.007.838.613,00

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022 adalah Rp 3.007.838.613,00 dan Rp 2.160.991.719,00. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 39% dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan oleh kenaikan yang signifikan pada belanja barang nonoperasional berupa kenaikan honorarium wakil kerja penjaga aset eks BPPN. Selain itu, terdapat kenaikan pada belanja jasa berupa honorarium narasumber dan belanja perjalanan dinas dalam negeri.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.006.194.111	1.011.527.962	(0,53)
Belanja Barang Nonoperasional	762.058.149	465.578.750	63,68
Belanja Jasa	154.984.600	4.813.793	3119,59
Belanja Pemeliharaan	235.667.696	241.099.999	(2,25)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	707.993.237	282.233.923	150,85
Belanja Barang Persediaan	140.940.820	155.737.292	(9,50)
Jumlah Belanja Kotor	3.007.838.613	2.160.991.719	39,19
Pengembalian Belanja			0,00
Jumlah Belanja	3.007.838.613	2.160.991.719	39,19

Belanja Modal

Rp

100.968.000,00

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 100.968.000,00 dan Rp 0,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan TA 2022 karena adanya anggaran belanja modal peralatan dan mesin.

Perbandingan Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100,968,000	-	100.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	0.00
Belanja Modal Lainnya	-	-	0.00
Jumlah Belanja Kotor	100,968,000	-	100.00
Pengembalian Belanja	-	-	0.00
Jumlah Belanja	100,968,000	-	100.00

B.5.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Perbandingan Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	-	0,00

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp 100.968.000,00, mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp 0,00 dikarenakan terdapat usulan belanja modal peralatan inventaris kantor.

Perbandingan Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Kursi Roda	2,100,000	-	100.00
Meja Kerja	58,590,000	-	100.00
Kursi Kerja	19,160,000	-	100.00
Sofa Tamu Single Seater	15,414,001	-	100.00
Meja Sofa Tamu	5,703,999	-	0.00
Jumlah Belanja	100,968,000	-	100.00

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Perbandingan Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0.00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	0.00
Pagar Permanen	-	-	0.00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0.00
Pengembalian Belanja	-	-	0.00
Jumlah Belanja	-	-	0.00

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Perbandingan Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jaringan	-	-	0.00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0.00
Pengembalian Belanja	-	-	0.00
Jumlah Belanja	-	-	0.00

B.5.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

*Belanja Bantuan Sosial
Rp 0*

B.6. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Belanja Bantuan Sosial

merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Perbandingan Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0.00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0.00
Pengembalian Belanja	-	-	0.00
Jumlah Belanja	-	-	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar

Rp

54.110.464.066,00

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 54.110.464.066,00 dan Rp 38.014.965.365,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp 0

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TA 2023	TA 2022
Saldo UP	-	-
Kuitansi UP	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara

Penerimaan

Rp 0,00

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 4.834,00.

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TA 2023	TA 2022
Pendapatan Jasa Lainnya	-	4,834
Jumlah	-	4,834

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp
53.617.782.037,00

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 53.617.782.037,00 dan Rp 37.173.017.420,00.

Kas Lainnya dan Setara kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP dan kas pada bendahara penerimaan yang merupakan dana pihak ketiga. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	TA 2023	TA 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	53.617.782.037	37.173.017.420
Jumlah	53.617.782.037	37.173.017.420

Adapun untuk rincian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada tanggal pelaporan sebagai berikut:

Keterangan	TA 2023	TA 2022
Rekening Lelang	1.431.820.000	9.083.482.522
Rekening Piutang	51.888.207.490	28.089.534.898
Rekening Valas	297.754.547	-
Jumlah	53.617.782.037	37.173.017.420

Jumlah saldo rekening valas Per 31 Desember 2023 sebesar US\$19.285,87 kemudian dikonversi ke rupiah dengan kurs JISDOR tanggal 29 Desember 2023 sebesar 1USD=Rp15.439,00 sehingga diperoleh nilai Rp.297.754.547,00.

Piutang Bukan
Pajak
Rp 0

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Piutang Bukan Pajak

Keterangan	TA 2023	TA 2022
-	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp 0

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Bagian Lancar
TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada
tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas)
bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian
Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

No	Nama	TA 2023	TA 2022
1		-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar TPA
Rp 0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per
tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah
sebesar Rp 0 dan Rp 0. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang
akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau
kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	TA 2023	TA 2022
1		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih-
Piutang Lancar
Rp 0

C.1.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar per 31
Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar adalah
merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang
ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar pada
tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar		0.50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar		0.50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar		0.50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar di Muka
Rp 0

C.1.8. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	TA 2023	TA 2022
-	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Rp 50.332.500,00

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 50.332.500,00 dan Rp 416.640.000,00.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis

pendapatan adalah sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Jenis	TA 2023	TA 2022
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	50,332,500	416,640,000
Jumlah	50,332,500	416,640,000

Pendapatan bea lelang pejabat lelang kelas I di atas telah diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta V dan kemudian disetorkan ke kas negara pada tanggal 3 Januari 2023 dengan nomor NTPN: 490402G4VP8OJ3QO.

Persediaan

Rp

442.349.529,00

C.1.10. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 442.349.529,00 dan Rp 425.303.111,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun 2023 terdapat penyesuaian nilai persediaan Koreksi kuantitas tambah sebesar Rp21.975.225. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	TA 2023	TA 2022
Barang Konsumsi	442,349,529	425,303,111
Jumlah	442,349,529	425,303,111

Aset Tetap

Rp 338.702.794,00

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 338.702.794,00 dan Rp 348.782.275,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap KPKNL Jakarta V terdiri dari Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah

Rp 0

C.2.1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	
- Pembelian	-
Mutasi kurang:	
- Revaluasi Aset	-
Saldo per 31 Desember 2023	-

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1			-
Jumlah			-

Peralatan dan

Mesin

Rp

4.154.632.841,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp 4.154.632.841,00 dan

Rp 4.008.402.189,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	4,008,402,189
Mutasi tambah:	
Pembelian	100,968,000
Transfer Masuk	80,300,000
Mutasi kurang:	
Penghentian Penggunaan BMN	35,037,348
Saldo per 31 Desember 2022	4,154,632,841
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2022	(3,838,782,947)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	315,849,894

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Pembelian Sofa, Meja dan Kursi Kerja senilai Rp100.968.000,00
- Transfer masuk 6 unit komputer unit (laptop) senilai Rp70.500.000,00
- Transfer masuk 1 unit LCD Monitor senilai Rp7.000.000,00
- Transfer masuk 1 unit Bracket Standing Peralatan senilai Rp2.800.000,00

Mutasi transaksi pengurangan peralatan dan mesin berupa penghentian penggunaan BMN:

- 1 unit komputer unit (laptop) senilai Rp12.000.000,00
- 2 unit scanner senilai Rp20.336.848,00
- 1 unit mesin ketik senilai Rp2.062.500,00
- 1 unit Router senilai Rp638.000,00

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan
Rp 0*

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp 0 dan Rp 0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
- Revaluasi Aset	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

*Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
Rp 0*

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
- Revaluasi Aset	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

*Aset Tetap
Lainnya
Rp 22.852.900,00*

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp 22.852.900,00 dan Rp 22.852.900,00. Aset Tetap tersebut berupa barang perpustakaan tercetak. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini per 31 Desember 2023.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	22,852,900
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	
Mutasi kurang:	
Penghentian Penggunaan BMN	
Saldo per 31 Desember 2023	22,852,900
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2023	
Nilai Buku per 31 Desember 2022	22,852,900

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp 0*

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp
3.838.782.947,00*

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp 3.838.782.947,00 dan Rp 3.682.472.814,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4,154,632,841	3,838,782,947	315,849,894
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	22,852,900	-	22,852,900
Akumulasi Penyusutan		4,177,485,741	3,838,782,947	338,702,794

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Piutang Jangka
Panjang
Rp 0*

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Tagihan TP/TGR
Rp 0

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	TA 2023	TA 2022
1		-	-
Jumlah		-	-

Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp 0

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian TPA

No	Debitur	TA 2023	TA 2022
1		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih-
Piutang Jangka
Panjang
Rp 0

C.3.3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan TPA atau TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Aset Lainnya

Rp 0

C.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya KPKNL Jakarta V terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain. Saldo Aset Lainnya KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada KPKNL Jakarta V terdiri dari Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud

Rp 0

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
-	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud

Uraian	Nilai
-	-
Jumlah	-

Aset Lain-lain

Rp. 35.037.348,00

C.4.2. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 35.037.348,00 dan Rp 29.118.126,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	
-Penghentian Penggunaan	35,037,348
Mutasi kurang:	
-Penjualan Melalui Lelang	
Saldo per 31 Desember 2023	35,037,348
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(35,037,348)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi

Penyusutan dan

Amortisasi Aset

Lainnya

Rp 35.037.348,00

C.4.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 35.037.348,00 dan Rp 29.118.000,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset

Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	35,037,348	35,037,348	-
Akumulasi Penyusutan		35,037,348	35,037,348	-

Kewajiban Jangka

Pendek

Rp

53.618.111.811,00

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 53.618.111.881,00 dan Rp 37.173.300.636,00.

Uang Muka dari

KPPN

Rp 0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada

Pihak Ketiga

Rp

53.618.111.811,00

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 53.618.111.811,00 dan Rp 37.173.300.636,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada KPKNL Jakarta V per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Utang Kepada Pihak Ketiga	53.618.111.811	Dana milik BUMN/swasta/pihak ketiga lainnya yang belum dipindahbukukan/ditransfer ke pihak yang berhak serta dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi

Pendapatan

Diterima di Muka

Rp 0

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah
-	-
Total	-

Beban yang Masih

Harus Dibayar

Rp 0

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp 0 dan Rp 0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar

Uraian	TA 2023	TA 2022
-	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas

Rp

831.054.979,00

C.6. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 831.054.979,00 dan Rp 1.190.447.004,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB

Rp

75.223.188.428,00

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 75.223.188.428,00 dan Rp 42.739.871.737,00.

Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK
Pendapatan Negara Bukan Pajak:			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	75,223,188,428	42,739,871,737	76.00
Jumlah	75,223,188,428	42,739,871,737	76.00

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya meliputi pendapatan biad pengurusan piutang negara, pendapatan bea lelang pegadaian, pendapatan bea lelang PL kelas I, pendapatan jasa lainnya dan pendapatan anggaran lain-lain yang transaksinya per 31 Desember 2023.

Beban Pegawai

Rp 0

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	-	-	0.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	0.00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	0.00
Beban Tunj. Anak PNS	-	-	0.00
Beban Tunj. Struktural PNS	-	-	0.00
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	0.00
Beban Tunj. PPh PNS	-	-	0.00
Beban Tunj. Beras PNS	-	-	0.00
Beban Tunjangan Umum PNS	-	-	0.00
Beban Uang Makan	-	-	0.00
Beban Lembur	-	-	0.00
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	0.00
Pengembalian Beban Uang Lembur	-	-	0.00
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-	-	0.00
Jumlah	-	-	0.00

Beban Persediaan
Rp 146.670.627,00

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 146.670.627,00 dan Rp 230.985.708,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	146,670,627	230,985,708	(36.50)
Beban Perseidaiaan Pita Cukai, Materai, dan Leges	-	-	0.00
Jumlah	146,670,627	230,985,708	(36.50)

*Beban Barang dan
Jasa*
Rp
1.923.283.488,00

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.923.283.488,00 dan Rp 1.482.203.721,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	695,518,721	649,391,706	7.10
Beban Jasa Profesi	149,000,000	1,573,000	9372.35
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	32,059,000	31,965,875	0.29
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	208,056,000	208,056,000	0.00
Beban Barang Operasional Lainnya	38,000,000	36,396,900	4.40
Beban Bahan	153,771,550	18,648,750	724.57
Beban Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	2,345,325	85,717,481	(97.26)
Beban Barang Non operasional Lainnya	608,286,599	446,930,000	36.10
Beban Langganan Telepon	3,248,728	3,240,793	0.24
Beban Sewa	2,719,500	-	0.00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	30,278,065	-	0.00
Jumlah	1,923,283,488	1,481,920,505	29.78

Beban

Pemeliharaan

Rp 235.667.696,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 235.667.696,00 dan Rp 241.099.999,00

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	235,667,696	241,099,999	(2.25)
Jumlah	235,667,696	241,099,999	(2.25)

Beban Perjalanan

Dinas

Rp

707.993.237,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 707.993.237,00 dan Rp 282.233.923,00.

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	431,243,237	133,983,923	221.86
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	0.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	276,750,000	148,250,000	86.68
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	-	-	0.00
Jumlah	707,993,237	282,233,923	150.85

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp 0*

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
-	-	-	0.00
Jumlah	-	-	0.00

*Beban Bantuan
Sosial
Rp 0*

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp 0 dan Rp 0.

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
-	-	-	0.00
Jumlah	-	-	0.00

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp 181.554.981,00

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 181.554.981,00 dan Rp 169.964.970,00.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	181,554,981	169,964,970	6.82
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	0.00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	0.00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	0.00
Jumlah Penyusutan	181,554,981	169,964,970	6.82
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	0.00
Jumlah Amortisasi	-	-	0.00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	181,554,981	169,964,970	6.82

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp 0

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31

Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	-	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Nonlancar	-	-	0.00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	0.00

*Surplus/Defisit
dari Kegiatan
Nonoperasional
Rp 25.355.224,00*

D.11. Kegiatan Nonoperasional

Pos Surplus dari Kegiatan Nonoperasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Nonoperasional pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Nonoperasional per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	3,379,999	-	0.00
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	21,975,225	-	0.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	0.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Nonoperasional	25,355,224	-	0.00

*Pos Luar Biasa
Rp 0*

D.12. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan, dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
-	-	-	0.00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	0.00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp

1.190.447.004,00

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.190.447.004,00 dan Rp 3.808.062.869,00.

Surplus LO

Rp

72.053.373.623,00

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 72.053.373.623,00 dan Rp 40.333.383.416,00. Surplus LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan nonoperasional, sampai dengan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif

Perubahan Kebijakan

Akuntansi/ Kesalahan

Mendasar

Rp 0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022.

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp 0

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp 0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah

sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2023

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan Lainnya	-

Selisih Revaluasi

Aset Tetap

Rp 0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Koreksi Aset Tetap

Nonrevaluasi

Rp 0

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Nonrevaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2023

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-lain

Rp 0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain TA 2023

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Antar

Entitas

Rp

(72.412.765.648,00)

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp (72.412.765.648,00) dan Rp (42.950.999.281,00). Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas TA 2023

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	75,592,880,761
Ditagihkan ke Entitas Lain	(3,108,806,613)
Transfer Masuk	(71,308,500)
Transfer Keluar	-
Pengesahaan Hibah Langsung	-
Pengesahaan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	(72,412,765,648)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp 75.592.880.761,00 sedangkan DKEL sebesar Rp 3.108.806.613,00.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer

Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 71.308.500,00 terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk TA 2023

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Kantor Pusat DJKN	(80,300,000)
2	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		8,991,500
Jumlah			(71,308,500)

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 0.

Ekuitas Akhir

Rp 831.054.979,00

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 831.054.979,00 dan Rp 1.190.447.004,00

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

A. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 271/KMK.01/2007 tentang pelimpahan wewenang kepada pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan untuk dan atas nama menteri keuangan menetapkan keputusan menteri keuangan tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang, pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara, pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan Kementerian Keuangan, maka dibentuklah jajaran baru Pejabat Pengelola Keuangan Satker sebagai Berikut:

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Partolo
Pejabat Pembuat Komitmen	: Hari Santosa
PPSPM	: Artho Guntoro
Bendahara Pengeluaran	: Abdul Rajab Nasution
Bendahara Penerimaan	: Havivi Natapura

B. Terdapat revisi anggaran kewenangan DJA pada Bulan Mei Tahun 2023 berupa penambahan pagu DIPA sebesar Rp649.752.000,00 untuk kegiatan Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara dan Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan.

LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V 119312

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 9:13 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	46,887,345,000	75,592,880,761	28,705,535,761	161	41,711,502,000	45,249,249,125	3,537,747,125	108
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	46,887,345,000	75,592,880,761	28,705,535,761	161	41,711,502,000	45,249,249,125	3,537,747,125	108
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	46,887,345,000	75,592,880,761	28,705,535,761	161	41,711,502,000	45,249,249,125	3,537,747,125	108
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	3,376,924,000	3,108,806,613	(268,117,387)	92	2,355,947,000	2,160,991,719	(194,955,281)	92
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	3,271,703,000	3,007,838,613	(263,864,387)	92	2,355,947,000	2,160,991,719	(194,955,281)	92
3. Belanja Modal	105,221,000	100,968,000	(4,253,000)	96	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V 119312

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 9:13 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	3,376,924,000	3,108,806,613	(268,117,387)	92	2,355,947,000	2,160,991,719	(194,955,281)	92
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 13 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

PARTOLO SE
196803231988031004

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 119312

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 13/05/24 9:14 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	16,000,000	3,379,999	0	3,379,999	21.12
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	9,000,000	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	25,000,000	3,379,999	0	3,379,999	13.52
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	582,522	0	582,522	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	582,522	0	582,522	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	487,543	0	487,543	0
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	33,755,000,000	27,300,431,862	0	27,300,431,862	80.88
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2,240,000,000	3,149,898,004	0	3,149,898,004	140.62
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	10,867,345,000	45,129,076,214	0	45,129,076,214	415.27
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	46,862,345,000	75,579,893,623	0	75,579,893,623	161.28
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	9,024,617	0	9,024,617	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	9,024,617	0	9,024,617	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	46,887,345,000	75,592,880,761	0	75,592,880,761	161.22
	JUMLAH PENDAPATAN	46,887,345,000	75,592,880,761	0	75,592,880,761	161.22

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 007
SATUAN KERJA : 119312
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 13/05/24 9:14 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 13/5/24 7:36 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	688,614,000	713,524,000	695,518,721	0	695,518,721	97.48	18,005,279
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	59,280,000	51,300,000	30,278,065	0	30,278,065	59.02	21,021,935
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	50,000,000	46,000,000	31,996,000	0	31,996,000	69.56	14,004,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	208,056,000	208,056,000	208,056,000	0	208,056,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	38,250,000	38,166,000	38,000,000	0	38,000,000	99.57	166,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	32,400,000	2,346,000	2,345,325	0	2,345,325	99.97	675
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,076,600,000	1,059,392,000	1,006,194,111	0	1,006,194,111	94.98	53,197,889
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	120,117,000	185,028,000	153,771,550	0	153,771,550	83.11	31,256,450
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	515,000,000	616,042,000	608,286,599	0	608,286,599	98.74	7,755,401
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	635,117,000	801,070,000	762,058,149	0	762,058,149	95.13	39,011,851
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	144,450,000	141,927,000	140,940,820	0	140,940,820	99.31	986,180
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	144,450,000	141,927,000	140,940,820	0	140,940,820	99.31	986,180
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	6,000,000	4,200,000	3,265,100	0	3,265,100	77.74	934,900
522141	Belanja Sewa	0	3,500,000	2,719,500	0	2,719,500	77.7	780,500
522151	Belanja Jasa Profesi	0	149,000,000	149,000,000	0	149,000,000	100	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	8,000,000	156,700,000	154,984,600	0	154,984,600	98.91	1,715,400
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	232,030,000	255,561,000	235,667,696	0	235,667,696	92.22	19,893,304
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	232,030,000	255,561,000	235,667,696	0	235,667,696	92.22	19,893,304
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	210,856,000	497,473,000	431,243,237	0	431,243,237	86.69	66,229,763
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	314,898,000	359,580,000	276,750,000	0	276,750,000	76.96	82,830,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	525,754,000	857,053,000	707,993,237	0	707,993,237	82.61	149,059,763
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,621,951,000	3,271,703,000	3,007,838,613	0	3,007,838,613	91.93	263,864,387
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105,221,000	105,221,000	100,968,000	0	100,968,000	95.96	4,253,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 007
SATUAN KERJA : 119312
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 13/05/24 9:14 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 13/5/24 7:36 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	105,221,000	105,221,000	100,968,000	0	100,968,000	95.96	4,253,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	105,221,000	105,221,000	100,968,000	0	100,968,000	95.96	4,253,000
	JUMLAH BELANJA	2,727,172,000	3,376,924,000	3,108,806,613	0	3,108,806,613	92.06	268,117,387

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 007
SATUAN KERJA : 119312
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN DKI Jakarta
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 13/05/24 9:14 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid --rekon17
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	32,400,000	2,346,000	2,345,325	0	2,345,325	99.97	675
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	32,400,000	2,346,000	2,345,325	0	2,345,325	99.97	675
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	34,400,000	2,346,000	2,345,325	0	2,345,325	99.97	675
	JUMLAH BELANJA	34,400,000	2,346,000	2,345,325	0	2,345,325	99.97	675

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (119312) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA V

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 9:13 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	0	4,834	(4,834)	(100.00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	53,617,782,037	37,173,017,420	16,444,764,617	44.24
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	50,332,500	416,640,000	(366,307,500)	(87.92)
Persediaan	442,349,529	425,303,111	17,046,418	4.01
JUMLAH ASET LANCAR	54,110,464,066	38,014,965,365	16,095,498,701	42.34
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	4,154,632,841	4,008,402,189	146,230,652	3.65
Aset Tetap Lainnya	22,852,900	22,852,900	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,838,782,947)	(3,682,472,814)	(156,310,133)	4.24
JUMLAH ASET TETAP	338,702,794	348,782,275	(10,079,481)	(2.89)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	35,037,348	29,118,126	5,919,222	20.33
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(35,037,348)	(29,118,126)	(5,919,222)	20.33
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	54,449,166,860	38,363,747,640	16,085,419,220	41.93
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	53,618,111,881	37,173,300,636	16,444,811,245	44.24
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	53,618,111,881	37,173,300,636	16,444,811,245	44.24
JUMLAH KEWAJIBAN	53,618,111,881	37,173,300,636	16,444,811,245	44.24
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	831,054,979	1,190,447,004	(359,392,025)	(30.19)
JUMLAH EKUITAS	831,054,979	1,190,447,004	(359,392,025)	(30.19)
JUMLAH EKUITAS	831,054,979	1,190,447,004	(359,392,025)	(30.19)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	54,449,166,860	38,363,747,640	16,085,419,220	41.93

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 13 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

PARTOLO SE
196803231988031004

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

UNIT ORGANISASI : 09

WILAYAH/PROVINSI : 0100

SATUAN KERJA : 119312

KEMENTERIAN KEUANGAN

DITJEN KEKAYAAN NEGARA

DKI JAKARTA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V

Tgl. Cetak 13/05/2024 9:14 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	4,834	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	37,173,017,420	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	416,640,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	425,303,111	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,008,402,189	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	22,852,900	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,682,472,814
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	29,118,126	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	29,118,126
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	283,216
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	37,173,017,420
0.0	391111	Ekuitas	0	1,190,447,004
JUMLAH			42,075,338,580	42,075,338,580

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (119312) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA V

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 9:13 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	53,617,782,037	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	50,332,500	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	442,349,529	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,154,632,841	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	22,852,900	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,838,782,947
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	35,037,348	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	35,037,348
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	329,844
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	53,617,782,037
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,108,806,613
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	75,592,880,761	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	71,308,500
0.0	391111	Ekuitas	0	1,190,447,004
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	3,379,999
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	582,522
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	482,709
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	26,934,124,362
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	3,149,898,004
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	45,129,076,214
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	9,024,617
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	21,975,225
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	695,518,721	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	30,278,065	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	32,059,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	208,056,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	38,000,000	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,345,325	0
3.0	521211	Beban Bahan	153,771,550	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	608,286,599	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	3,248,728	0
3.0	522141	Beban Sewa	2,719,500	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	149,000,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	235,667,696	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	431,243,237	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	276,750,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	181,554,981	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	146,670,627	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (119312) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA V

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 9:13 AM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			137,111,037,945	137,111,037,945

Keterangan :
FINAL

Jakarta, 13 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

PARTOLO SE
196803231988031004

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (119312) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA V

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 9:14 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	3,108,806,613
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	75,592,880,761	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	3,379,999
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	582,522
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	487,543
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	27,300,431,862
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	3,149,898,004
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	45,129,076,214
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	9,024,617
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	695,518,721	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	30,278,065	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	31,996,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	208,056,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	38,000,000	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,345,325	0
3.0	521211	Belanja Bahan	153,771,550	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	608,286,599	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	140,940,820	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	3,265,100	0
3.0	522141	Belanja Sewa	2,719,500	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	149,000,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	235,667,696	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	431,243,237	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	276,750,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100,968,000	0
JUMLAH			78,701,687,374	78,701,687,374

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 13 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

PARTOLO SE
196803231988031004

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

**SATUAN KERJA : (119312) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA V**

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 9:13 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	75,223,188,428	42,739,871,737	32,483,316,691	76.002
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	75,223,188,428	42,739,871,737	32,483,316,691	76.002
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	75,223,188,428	42,739,871,737	32,483,316,691	76.002
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	146,670,627	230,985,708	(84,315,081)	(36.502)
Beban Barang dan Jasa	1,923,283,488	1,482,203,721	441,079,767	29.758
Beban Pemeliharaan	235,667,696	241,099,999	(5,432,303)	(2.253)
Beban Perjalanan Dinas	707,993,237	282,233,923	425,759,314	150.853
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

**SATUAN KERJA : (119312) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA V**

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 9:13 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	181,554,981	169,964,970	11,590,011	6.819
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3,195,170,029	2,406,488,321	788,681,708	32.773
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	72,028,018,399	40,333,383,416	31,694,634,983	78.582
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	3,379,999	0	3,379,999	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	3,379,999	0	3,379,999	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	21,975,225	0	21,975,225	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	21,975,225	0	21,975,225	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	25,355,224	0	25,355,224	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	72,053,373,623	40,333,383,416	31,719,990,207	78.645
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	72,053,373,623	40,333,383,416	31,719,990,207	78.645

Keterangan :
FINAL

Jakarta, 13 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

PARTOLO SE
196803231988031004

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (119312) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA V

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 9:13 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,190,447,004	3,808,062,869	(2,617,615,865)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	72,053,373,623	40,333,383,416	31,719,990,207	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(72,412,765,648)	(42,950,999,281)	(29,461,766,367)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(359,392,025)	(2,617,615,865)	2,258,223,840	-
EKUITAS AKHIR	831,054,979	1,190,447,004	(359,392,025)	-

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

PARTOLO SE

196803231988031004